

PENTINGNYA KEWARGANEGARAAN UNTUK MENCiptakan KARAKTER BANGSA DI ERA SOCIETY 5.0

Lisa Puspitasari¹, Syamriba Ardila², Ragil Husain³, Uswatun Hasanah⁴

^{1,2,3,4} Program Studi PPKN, Fakultas KIP, Universitas Panca Marga Probolinggo

* Corresponding Email: lisapuspitasi509@gmail.com

A B S T R A K

Pendidikan kewarganegaraan telah dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan pada semua jenjang. Fungsi dan peran pendidikan kewarganegaraan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan itu sendiri adalah untuk menjadikan warganya warga negara yang baik, karena warga negara yang baik tidak dapat secara langsung mendukung pembangunan berkelanjutan di negara Indonesia. Metode penelitian ini mengadopsi studi literatur, yang memuat teori-teori teoritis yang berkaitan dengan masalah penelitian, yang mengumpulkan data dengan mempelajari buku, dokumen, catatan dan laporan yang berkaitan dengan pemecahan masalah, dan diharapkan pendidikan di Indonesia akan memampukan peserta didik, dipersiapkan untuk menjadi warga negara. Mereka tegas dan konsisten dalam mempertahankan negara kesatuan NKRI, dan pembangunan cita-cita bangsa dijadikan sebagai penggerak utama pembangunan negara. Artinya, setiap upaya pembangunan harus selalu diarahkan pada aspek yang berdampak positif bagi pembangunan karakter.

Kata Kunci : Pendidikan, Pendidikan kewarganegaraan, karakter.

A B S T R A C T

Citizenship education has been included in the education curriculum at all levels. The function and role of civic education to achieve national education goals. The purpose of citizenship education itself is to make its citizens good citizens, because good citizens cannot directly support sustainable development in Indonesia. This research method adopts literature study, which contains theoretical theories related to research problems, which collects data by studying books, documents, notes and reports related to problem solving, and it is hoped that education in Indonesia will enable students, be prepared to become citizen. They are firm and consistent in defending the unitary state of the Unitary State of the Republic of Indonesia, and the development of the nation's ideals is used as the main driver of state development. That is, every development effort must always be directed at aspects that have a positive impact on character development.

Keywords : Education, civic education, character.

PENDAHULUAN

Kewarganegaraan sangat wajib dimiliki oleh setiap warga negara yang hidup, tinggal, dan melakukan semua aktivitasnya disuatu negara. Setiap warga negara akan memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Setiap orang haruslah terjamin haknya untuk mendapatkan status kewarganegaraan, sehingga dapat menghindarkan terjadinya tidak berkewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan

merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang utuh. Oleh karena itu, proses pendidikan kewarganegaraan dimasukkan ke dalam kurikulum dan pembelajaran pada semua jenjang Pendidikan dari Sekolah Dasar sampai Universitas. Peran PKn untuk pencapaian tujuan pendidikan nasional sehingga perlu memahami mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan karna itu semua merupakan landasan dan pola pikir Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan ialah bentuk pengembangan individu-individu agar mendukung dan memperkuat politik di negaranya, dimana politik itu hasil dari kesepakatan. Pendidikan Kewarganegaraan tidak mungkin bertentangan dengan politik di negara tersebut, untuk mendukung dan memperkuat politiknya. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri adalah agar warganya menjadi warga negara yang baik dan mendukung keberlangsungan negaranya. Manusia selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan karakter manusia dapat sangat mudah terpengaruh apalagi pada usia anak sekolah dasar. Setiap individu mengalami berbagai perkembangan, yang mengakibatkan munculnya perubahan, dimana perubahan karakter ini meliputi sikap dan perilaku anak. Dalam perkembangan dan perubahan karakter ini sangat dipengaruhi dari berbagai faktor, seperti faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti faktor genetik yang dapat diartikan sebagai potensi, baik secara psikis. Sedangkan Faktor eksternal adalah faktor lingkungan, faktor lingkungan ini merupakan yang turut membentuk dan berpengaruh terhadap karakter anak. Apalagi di zaman sekarang ini banyak pengaruh globalisasi dan banyak budaya asing dari luar yang masuk ke Indonesia. Dengan begitu, di zaman sekarang ini banyak anak yang lebih mengenal budaya luar dibandingkan budaya bangsa Indonesia. Bahkan mereka tidak mengetahui mengenai apa itu Pancasila, tokoh-tokoh nasional dan lagu kebangsaan dan lagu-lagu nasional. Anak-anak di zaman sekarang lebih mengetahui tokoh-tokoh dalam sebuah permainan online serta lebih mengenal lagu-lagu idol K-pop (lagu yang berasal dari Korea) .

Maka dari itu, sangat penting menerapkan pendidikan kewarganegaraan sejak usia dini dengan tujuan untuk menjaga dan mempertahankan Pancasila dan, budaya bangsa Indonesia itu sendiri serta menumbuhkan sikap dan perilaku cinta tanah air, bermoral, berjiwa demokratis, menjadi warga negara yang disiplin dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan ini sangatlah penting perannya dalam kehidupan, karena generasi berpendidikan mampu memajukan suatu bangsa, serta sebagai ujung tombak untuk mengetahui apa yang belum diketahui. Orang tua dan guru memiliki peran besar terhadap karakter anak. Orang tua dan guru dapat mempengaruhi dalam akademiknya, tetapi juga mempengaruhi sikap anak terhadap pembelajaran sekolah dan pembelajaran secara keseluruhan, apalagi dalam pendidikan kewarganegaraan yang sangat penting dalam membangun karakter anak.

Proses dari Pendidikan Kewarganegaraan itu untuk memberdayakan dan membudayakan peserta didik atau mahasiswa dalam arti bahwa proses dan hasil pendidikan tersebut harus mampu memfasilitasi peserta didik atau mahasiswa untuk melakukan proses belajar untuk memperluas wawasan belajar, membangun kemampuan belajar yang akan berguna untuk hidup dan berkehidupan yang akan datang di negara tersebut. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan proses pendidikan untuk membangun keteladanan kemauan dan kemampuan mengembangkan kreatifitas yang

mencerminkan jati diri bangsa yang syarat dengan nilai-nilai sosial kultural ke-Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) yang menempatkan secara proposisional aspek pendidikan, seperti: pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan. Dimana negara tidak membolehkan seseorang memiliki dua status kewarganegaraan, termasuk negara Indonesia. Oleh karena itu diperlukan perjanjian kewarganegaraan antara negara modern untuk menghindari status dwi kewarganegaraan.

Sebagai warga negara wajib membina hak dan kewajiban yang telah diatur dalam UUD 1945 dengan baik. tujuan agar generasi muda menjadi warga negara yang baik. Indonesia telah mewajibkan untuk mempelajari Pendidikan Kewarganegaraan di lima status, pertama sebagai mata pelajaran di sekolah. Kedua, sebagai mata kuliah di Perguruan Tinggi. Ketiga, sebagai salah satu cabang pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial dalam kerangka program pendidikan guru. Keempat, sebagai program pendidikan politik yang dikemas dalam bentuk Penataran Pedoman Penghayatan (Penataran P4) atau sejenisnya yang pernah dikelola oleh Pemerintah sebagai satuan crash program. Kelima, sebagai kerangka konseptual dalam pemikiran individual dan kelompok pakar terkait. Tujuan lainnya adalah untuk menyadarkan generasi muda bahwa semangat perjuangan bangsa merupakan kekuatan mental spiritual telah dilahirkan kekuatan yang luar biasa dalam masa perjuangan fisik, sedangkan dalam menghadapi globalisasi merupakan perjuangan non fisik sesuai dengan profesi masing-masing.

Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, orang tua, yang semuanya itu diproses guna untuk melatih para siswa untuk cinta tanah air dan tidak melupakan budaya nya sendiri , berpikir kritis , bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan ini untuk membentuk warga negara yang baik (good citizen). Diharapkan walaupun di era reformasi 5.0 agar dapat menjadi generasi penerus bangsa Indonesia yang baik, berkarakter dan berbudi pekerti luhur.

Urgensi

Di zaman sekarang ini banyak hal yang dapat mempengaruhi karakter anak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak anak-anak tidak mengetahui sama sekali mengenai Pancasila, tokoh-tokoh nasionalisme dan bahkan lagu-lagu nasional. Maka dari itu, sangat penting menerapkan Pendidikan Kewarganegaraan dengan tujuan untuk menjaga dan mempertahankan Pancasila serta menumbuhkan sikap dan perilaku cinta tanah air, berjiwa demokratis, menjadi warga negara yang disiplin dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan. Padahal dengan berkembangnya zaman teknologi semakin canggih dan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya belajar. Bukan hanya belajar akademik tetapi juga Pendidikan Kewarganegaraan agar anak-anak dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air dan patriotisme, serta menjadi warga negara yang baik, yang tidak meninggalkan identitas bangsa negaranya sendiri.

Pendidikan kewarganegaraan (Civic Education) merupakan suatu program pendidikan yang berisikan bahasan tentang masalah kebangsaan. Kewarganegaraan dalam hubungannya dengan negara, demokrasi, Hak Asasi Manusia dan masyarakat civil society yang dalam implementasinya menerapkan prinsip-prinsip pendidikan demokratis dan humanis. Pendidikan kewarganegaraan di banyak negara ingin membentuk warganya agar menjadikan warga negara yang baik, guna mendukung keberlangsungan negara ini adalah tujuan umum dari. Pendidikan kewarganegaraan Di Indonesia menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan tidak lepas dari tujuan, tatanan, dan kepentingan komunitas politiknya, dalam hal ini kehidupan bangsa dan bernegara Indonesia. Di Dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran berkontribusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, nilai dan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk warga negara nya agar menjadi baik (good citizen). Dalam mempelajari pendidikan kewarganegaraan ini mempunyai fungsi yaitu agar semua peserta didik memahami hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam rangka pengembangan kemampuan yang utuh, agar Mahasiswa mempunyai rasa cinta globalisasi, berjiwa nasionalisme, dan juga bermoral agar tidak mudah terpengaruh oleh dampak tanah negatif dalam berbagai kondisi.

Komunitas internasional. National Council for the Social Studies (NCSS) berpendapat dan menyebut bahwa tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai berikut.

- a. Agar warga negara dapat memiliki pengetahuan serta keterampilan untuk pemecahan masalah yang terjadi sekarang maupun masa yang akan datang dengan dihadapi secara dewasa.
- b. Warga negara memiliki kesadaran adanya pengaruh sains dan teknologi terhadap peradaban serta mampu memanfaatkannya untuk memperbaiki nilai kehidupan yaitu dengan cara memanfaatkan teknologi secara baik, benar dan bijak.
- c. Warga negara menyadari bahwa mereka hidup dalam dunia yang terus berkembang, yang membutuhkan kesediaan untuk menerima fakta baru, gagasan baru, serta tata cara hidup yang baru.
- d. Warga negara dapat berperan serta dalam proses pembuatan keputusan melalui pernyataan pendapat kepada wakil – wakil rakyat, para pakar dan para spesialis.
- e. Warga negara memiliki keyakinan terhadap kebebasan individu serta persamaan hak bagi setiap orang yang dijamin oleh Konstitusi.
- f. Warga negara memiliki kebanggaan terhadap prestasi bangsa, penghargaan terhadap sumbangan yang diberikan bangsa lain serta dukungan untuk perdamaian serta kerjasama.
- g. Warga negara mampu memanfaatkan seni yang kreatif untuk meningkatkan perasaan terhadap pengalaman manusia yang universal serta pada keunikan individu.
- h. Mempersiapkan warga negara yang mampu menentukan pilihan yang tepat diantara berbagai macam alternatif yang terdapat dalam suatu masyarakat.

Selain itu tujuan dari mempelajari pendidikan kewarganegaraan ini adalah, sebagai berikut:

- a. Dapat memperlihatkan karakter yang mencerminkan penghayatan, pemahaman, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan moral secara personal dan sosial.
- b. Mempunyai komitmen konstitusional yang ditopang oleh sikap positif dan pemahaman utuh tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Diharapkan bahwa warga negara Indonesia dapat berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif serta memiliki semangat kebangsaan dan cinta tanah air yang dijewali oleh nilai-nilai Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Berpartisipasi secara aktif, cerdas, dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat, tunas bangsa, dan warga negara sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang hidup bersama dalam berbagai tatanan sosial kultural.

Dalam Standar Isi Pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana tertuang dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan Warga Negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi Warga Negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Menurut Margaret Stimmann Branson (1998), terdapat 3 (tiga) komponen utama yang perlu dikuasai dalam belajar Pendidikan Kewarganegaraan. Ketiga komponen utama Pendidikan Kewarganegaraan itu adalah:

- a. Pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), Civic knowledge berkaitan dengan isi atau apa yang harus warga negara ketahui.
- b. Keterampilan kewarganegaraan (civic skills), Civic skills merupakan keterampilan apa yang seharusnya dimiliki oleh warga negara yang mencakup keterampilan intelektual dan keterampilan partisipasi.
- c. Sikap kewarganegaraan (civic disposition), Civic disposition berkaitan dengan karakter privat dan publik sari warga negara yang perlu dikembangkan dan dipelihara dalam kehidupan bernegara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dibuat dengan menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan metode literatur dengan penelitian deskriptif berdasarkan studi kasus dan telaah pustaka yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara memperbaiki karakter moral dan nilai-nilai norma anak bangsa Indonesia dengan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Data dari penelitian ini didapatkan dari berbagai buku elektronik, jurnal ilmiah, artikel ilmiah dan web lain yang telah dipastikan keakuratannya. Teknik analisis penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan serta menelaah satu per satu e-book atau jurnal terkait tentang pentingnya Pendidikan Kewarganegaraan. Hasil pencarian yang memenuhi kriteria kemudian dilakukan analisis artikel dan analisis terhadap murid sekolah dasar di lingkungan sekitar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan kewarganegaraan atau civic education merupakan program pendidikan yang mempunyai lingkungan interdisipliner yang didasarkan pada teori disiplin ilmu sosial, yaitu interdisipliner dan multidimensi, dan disiplin ilmu tersebut didasarkan pada disiplin ilmu politik yang terstruktur. Menurut National Council for Social Research (NCSS), kewarganegaraan adalah proses yang mencakup semua pengaruh positif dan bertujuan untuk membentuk pandangan warga tentang peran mereka dalam masyarakat. Sebagai program pendidikan, tujuan utama kewarganegaraan adalah membangun warga negara yang lebih baik berdasarkan kondisi, standar, dan standar ukuran (sebagaimana diatur dalam Pembukaan UUD 1945) (Cholisn, 2000: 1.7). Dalam kesempatan yang sama, Nu'man Soemantri menjelaskan bahwa PKn merupakan program pendidikan dengan inti demokrasi politik yang berkembang dengan berkembangnya sumber-sumber ilmu lain, dan berdampak besar bagi pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Agar berdampak positif, semua ini telah dilatih untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa. Melakukan tindakan demokrasi secara analitis dan mempersiapkan kehidupan demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 (Cholisn, 2000:1.7). Menurut Sunarso, dkk (2008:1), pendidikan kewarganegaraan merupakan bidang penelitian yang misinya mencerdaskan bangsa Indonesia melalui koridor "pendidikan berbasis nilai".

Konfigurasi atau sistemik PKn dibangun atas paradigma sebagai berikut: Pertama, kurikulum kewarganegaraan dirancang sebagai tema pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri dan menjadi warga negara yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. Kedua, kewarganegaraan secara teoritis dirancang sebagai mata pelajaran yang meliputi aspek kognitif, emosional, dan psikomotorik yang menyatu dalam ruang lingkup pemikiran, nilai, konsep dan moral Pancasila,kewarganegaraan demokratis dan substansi negara, atau saling menembus dan membaur pertahanan. Ketiga, warga negara secara praktis dirancang sebagai tema pembelajaran, menekankan bahwa konten yang mengandung nilai-nilai dan pengalaman belajar berupa berbagai tingkah laku yang perlu direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pembelajaran kehidupan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, ber-bangsa, dan bernegara. Yang menguraikan pemikiran, nilai, konsep dan moral Pancasila, kewarganegaraan demokratis dan pertahanan kehidupan sosial nasional.

Oleh karena itu, jika fokusnya pada bidang penelitian, maka ideologi PKN yang sangat diperlukan adalah perilaku warga negara. Namun perlu disadari bahwa perilaku warga sangat terkait dengan lingkungan, sehingga bidang penelitian ini adalah lingkungan tempat tinggal dan keberadaan warga negara.

B. Pendidikan Kewarganegaraan dalam dunia pendidikan di Perguruan Tinggi

Pendidikan Kewarganegaraan sebenarnya dilakukan dan dikembangkan diseluruh dunia, meskipun dengan berbagai istilah atau nama. Mata kuliah tersebut sering disebut civic education, citizenship education, dan bahkan ada yang menyebut democracy education. Mata kuliah ini memiliki peran yang strategis dalam mempersiapkan warga negara yang cerdas, bertanggung jawab, berkaadaban. Berdasarkan rumusan "Civic

International" (1995), disepakati bahwa pendidikan demokrasi penting untuk pertumbuhan civic culture, untuk keberhasilan pengembangan dan pemeliharaan pemerintahan demokrasi (Mansoer, 2005).

Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok mata kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi atas mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut maka kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian tersebut wajib diberikan disemua Fakultas dan Jurusan di seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia.

Fakta seluruh negara di dunia, memiliki kesadaran bahwa Demokrasi serta Implementasinya harus senantiasa dikembangkan dengan basis filsafat bangsa, identitas nasional, kenyataan dan pengalaman sejarah bangsa tersebut, serta dasardasar kemanusiaan dan keadaban. Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan intelektual Indonesia memiliki dasar kepribadian sebagai warga negara yang demokratis, religius, berkemanusiaan, dan berkeadaban.

Berdasarkan Keputusan DIRJEN Dikti No. 43/Dikti/Kep/2006, tujuan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan adalah dirumuskan dalam visi, misi, dan kompetensi sebagai berikut:

VISI: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi adalah sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya, hal ini berdasarkan suatu realitas yang dihadapi, bahwa mahasiswa adalah sebagai generasi bangsa yang harus memiliki visi intelektual, religius, berkeadaban, berkemanusiaan, dan cinta tanah air dan bangsanya.

Misi: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya, agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral.

Oleh karena itu kompetensi yang diharapkan mahasiswa adalah untuk menjadi ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokrasi, berkeadaban. Selain itu kompetensi yang diharapkan agar mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki daya saing, berdisiplin, dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Berdasarkan pengertian tersebut maka kompetensi mahasiswa dalam Pendidikan Tinggi tidak dapat dipisahkan dengan filsafat bangsa.

C. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Secara keseluruhan pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk me-wujudkan nilai- nilai dan akhlak setiap warga negara dalam Pancasila, nilai dan norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan komitmen Bhineka Tunggal Ika, serta komitmen pada persatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, secara sadar

dan sistematis, sesuai dengan per-kembangan dan psikologi serta latar belakang kehidupannya, mendorong siswa untuk mempelajari seluruh ke-hidupan demokrasi, yaitu belajar demokrasi, belajar dalam iklim, dan menegakkan demokrasi melalui pembelajaran dan Menurut kurikulum Center yang dikutip oleh Sunarso, dkk (2008: 11), PKn bertujuan untuk menyediakan kemampuan sebagai berikut:

- a) Pikirkan secara kritis, rasional dan kreatif tentang masalah kewarga- negaraan.
- b) Berkualitas tinggi, berpartisipasi secara bertanggung jawab, dan ber-tindak bijak dalam kegiatan ke-masyarakat, nasional, dan ke-negaraan.
- c) Berkembang secara positif dan demokratis, membentuk diri Anda dengan karakter bangsa Indonesia, dan memungkinkan mereka untuk hidup bersama negara lain.
- d) Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk berinteraksi langsung atau tidak langsung dengan negara lain di dunia.

Menurut Ahmad Sanusi, Cholisin (2000: 1.17) mengemukakan bahwa biasanya tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai berikut:

- a. Hidup kita dijamin oleh Konstitusi.
- b. Menurut pembudidayaan nasional yang diatur oleh konstitusi.
- c. Tingkatkan kesadaran sipil melalui pendidikan dan pertukaran politik.
- d. Mendidik warga negara yang bertanggung jawab.
- e. Latihan demokrasi.
- f. Berpartisipasi aktif dalam urusan publik.
- g. Sekolah berfungsi sebagai laborato-rium demokrasi.
- h. Prosedur pengambilan keputusan.
- i. Latihan kepemimpinan.
- j. Pengawasan demokratis terhadap badan eksekutif dan legislatif.
- k. Mempromosikan pemahaman dan kerjasama internasional.

D. Landasan Pendidikan Kewarganegaraan

Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan konstitusional pada awal alinea keempat menjadi landasan teori bagi tujuan bernegara. Salah satu tujuan bernegara dapat diperjelas dari pernyataan “pendidikan kehidupan bangsa”. Jika dilihat, ketiga kata ini memiliki arti yang dalam. Kehidupan pendidikan di suatu negara me-ngandung informasi tentang pentingnya pendidikan bagi semua anak di negara tersebut. Dalam kehidupan warga negara, pernyataan ini menyampaikan informasi kepada penyelenggara negara dan setiap orang, sehingga memungkinkan mereka memiliki kemampuan berpikir, bertindak, dan berperilaku dalam proses penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan nasional dan sosial.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang penggunaan sistem pendidikan nasional sebagai dasar dan informasi bagi dunia usaha yang berkaitan dengan pendidikan kewarga-negaraan. Dalam Pasal 3 ayat (2) tentang fungsi dan tujuan negara disebutkan bahwa peran pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan dan membentuk karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam ke-hidupan para intelektual negara, yang bertujuan untuk membangun bangsa. negara. Orang yang berakhhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung

jawab berpotensi menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

“Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional” tentang integritas pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib bagi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi menunjukkan bahwa disiplin ilmu ini mempunyai posisi yang strategis dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional negara. Arah pengembangannya harus fokus pada menjadikan siswa agar menjadi orang Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Somantri (1969, p. 7) menjelaskan bahwa mata pelajaran kewarganegaraan atau kewarga- negaraan pada dasarnya terdiri dari pengalaman belajar pada saat itu, pengalaman belajar tersebut berasal dari sejarah, geografi, ekonomi dan politik, pidato presiden, deklarasi hak asasi manusia dan pengetahuan tentang Persatuan. Bangsa”. Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang tegas dan konsisten dalam membela negara kesatuan Republik Indonesia. Hakikat negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara- bangsa modern. Negara- bangsa modern adalah negara yang dilandasi oleh semangat kebangsaan atau nasionalisme, artinya, meskipun warga negara tersebut memiliki keyakinan agama yang berbeda, suatu masyarakat bertekad untuk mem- bangun masa depan, ras, ras, atau kelompok yang sama dalam satu kesatuan. negara. (Sekretariat Nasional Republik Indonesia, 1998).

Komitmen yang tegas dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam bermasyarakat, ber-bangsa, dan berbangsa yang ber-landaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia perlu terus disampaikan guna memperdalam pemahaman tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara historis, negara Indonesia di- ciptakan sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bangsa ke- daulatan rakyat. Landasannya adalah satu-satunya manusia yang ketuhanan, adil dan beradab. Persatuan dan masyarakat Indonesia dipimpin oleh kearifan dan kearifan dalam musyawarah yang representatif, dan telah mewujudkan masyarakat semua. Rakyat indonesia keadilan. (Pem- bukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Dalam konteks pembentukan karakter dan negara seperti ini, pen- didikan kewarganegaraan memiliki fungsi dan peran yang sangat penting. Pendidikan kewarganegaraan merupakan pembangunan pendidikan karakter yang sistematis dan sistematis, yang tidak terlepas dari kerangka kebijakan pembangunan nasional, pembangunan nasional, dan pembangunan karakter.

Selama kemerdekaan, Indonesia telah mengalami berbagai peristiwa yang mengancam keutuhan negara. Oleh karena itu, perlu di- tanamkan pemahaman yang mendalam dan komitmen yang tegas dan konsisten terhadap prinsip-prinsip semangat ke-bangsaan dalam kehidupan ber-masyarakat, berbangsa, dan berbangsa yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di seluruh bagian konstituen bangsa Indonesia, khususnya sebagai penerus bangsa. bangsa, generasi muda.

Kedepannya, Indonesia akan menikmati kehidupan demokrasi yang lebih baik, dalam arti sistem pe- merintahan akan lebih terlindungi dalam kehidupan bermasyarakat,

ber- bangsa, dan bernegara, warga berhak menjalankan prinsip-prinsip demo- kras. Demi kemuliaan bangsa dan negara Indonesia, kehidupan demokrasi keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam kehidupan sehari-hari perlu diakui, digagas, di-internalisasikan dan diimplementasi-kan. Demokrasi suatu negara hanya dapat berkembang di bawah pe-ngawasan warga negara demokratis. Warga negara demokratis tidak hanya menikmati hak atas kebebasan pribadi, tetapi juga harus berbagi tanggung jawab dengan orang lain untuk mem-bentuk masa depan yang cerah. Padahal, kehidupan demokrasi adalah cita-cita yang diwujudkan dan di-anugerahkan ketika para pendiri negara dan negara pertama kali membahas dan merumuskan Pancasila dan UUD 1945.

Pembangunan karakter bangsa dijadikan sebagai arus utama pem- bangunan nasional. Artinya setiap upaya pembangunan harus selalu di- arahkan pada aspek yang berdampak positif bagi pembangunan karakter. Padahal, hal tersebut secara konstitusi- onal tercermin dalam misi pem-bangunan nasional. Menurut "Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025" (dalam Zubaidi, 2011: 7), pendidikan karakter di- posisikan sebagai tugas pertama dari delapan tugas untuk mewujudkan visi pembangunan nasional. Kuat, berdaya saing, berakhhlak mulia, dan bermoral berlandaskan Pancasila yang merinci ciri dan perilaku masyarakat dan masyarakat Indonesia, keragaman bangsa dan bangsa Indonesia, ke- percayaan dan rasa takjub akan ke- mahakuasaan, kebaikan, toleransi, dan kerjasama, Dengan patriotisme, per- kembangan dinamis, dan berorientasi pada iptek.

Peran warga negara sebagai garda terdepan pendidikan karakter sudah jelas, harus mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam kegiatan belajar mengajar, karena hal ini secara jelas dituangkan dalam tujuan belajar warga yang dijabarkan dalam (Darmadi, 2010: 52), yaitu: pembinaan Moralitas yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari adalah perbuatan menyebarkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok agama, perbuatan manusiawi dalam keadilan dan peradaban, serta diversifikasi perbuatan untuk mendukung persatuan bangsa dalam masyarakat. Kepentingan masyarakat mendukung perilaku masyarakat yang mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan individu dan kelompok, sehingga dapat mewujudkan perbedaan pemikiran, pendapat atau kepentingan melalui musyawarah mufakat, dan mendukung upaya pen-capaiian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan tujuan tersebut dapat dipahami sebagai pembelajaran ke- warganegaraan adalah pembelajaran yang isi pembelajarannya sarat dengan nilai individu. Namun permasalahan yang peneliti temukan di bidang ini adalah bahwa pembelajaran dan praktik pendidikan kewarganegaraan yang dilaksanakan di dalam kelas saat ini terbatas pada pendidikan yang bertujuan untuk mencapai tujuan kognitif atau pengetahuan. Pada saat yang sama, secara emosional, hal-hal yang ber-kaitan dengan proses pembentukan karakter / sikap siswa seringkali terabaikan. Pandangan Suwarma (Budimansyah, 2012: 450) juga memperkuat pandangan ini, yaitu: siswa dalam keadaan pasif dapat menerima status mata kuliah setiap saat, pengetahuan lebih kuat dari sikap dan keterampilan, dan penggunaan metode dibatasi pada tidak me-nyenangkan situasi belajar dan satu arah. Oleh karena itu, perlu diawali dengan perencanaan,

pelaksanaan, dan evaluasi untuk meningkatkan pem-belajaran PKn dalam pengembangan karakter peserta didik. Kita harus mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi untuk meng- internalisasi nilai-nilai karakter yang ada, karena menumbuhkan nilai-nilai karakter tidak hanya membutuhkan pengajaran tetapi juga pengembangan.

Seperti yang dikatakan Hermann dalam (Budimansyah, 2010: 68), "nilai bukanlah dipelajari atau diajarkan, itu dipelajari". Hal ini agar sebagai pendidik, kita dapat membina anak-anak yang cerdas sekaligus individual. Pembentukan kecerdasan emosional yang mengarah pada sikap/peran individu dapat dicapai melalui pendidikan peran. Banyak ahli yang me-ngetahui sesuatu tentang pendidikan karakter. Zubaedi (2012: 15) me-ngemukakan bahwa pendidikan moral merupakan suatu upaya yang disengaja (disadari) untuk mencapai kebaikan, yaitu memiliki kualitas manusia yang baik secara obyektif, yang tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga bagi seluruh masyarakat. Selain itu, David Elkind dan Freddy Sweed me-ngemukakan dalam (Zubaedi, 2012: 15) bahwa pendidikan karakter adalah upaya yang disengaja (untuk secara sadar membantu orang memahami, peduli dan menerapkan nilai-nilai inti moral. Bila kita mempertimbangkan jenis karakter yang kita inginkan Anak, Anak-anak, tentu saja, kita meng-harapkan mereka untuk dapat menilai apa kebenaran itu, benar- benar peduli dengan kebenaran, dan bahkan dalam menghadapi tekanan eksternal dan upaya internal, kita dapat menghitung apa yang mereka anggap sebagai kebenaran.

Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebenarnya merupakan salah satu mata kuliah yang kaya akan nilai karakter. Kewarganegaraan merupakan salah satu bidang utama pembelajaran karakter. Oleh karena itu, tujuan karakter yang ditetapkan dalam PKn sebenarnya adalah pengaruh peng- ajaran, bukan sekedar pengaruh pendampingan. Hal ini sejalan dengan pedoman pengembangan silabus dengan ciri khas Kementerian Pendidikan Nasional yang dikutip dalam Gunawan (2012: 226), pedoman tersebut bertujuan untuk memajukan pembelajaran dan membantu siswa dalam mengembang-kan karakter. tugas- tugas berikut harus diselesaikan:

- a. Menambah dan/atau memodifikasi kegiatan pembelajaran sehingga memuat kegiatan pembelajaran yang dapat membentuk nilai karakter yang diinginkan.
- b. Menambah dan/atau memodifikasi teknik evaluasi sehingga teknik evaluasi untuk pengembangan karakter dapat dikembangkan dan / atau diukur.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Pendidikan kewarganegaraan me- rupakan salah satu pilar pembentukan karakter dan jati diri bangsa, artinya pendidikan kewarganegaraan mendidik warga negara menjadi warga negara yang baik (good citizen) dan smart citizen (warga negara yang cerdas) guna menghadapi perkembangan dunia di era persaingan. Pendidikan karakter dalam pembelajaran kewarganegaraan me- rupakan solusi yang dapat merevitalisasi peran warga negara sebagai disiplin ilmu yang merupakan ladang unggulan dalam pembinaan karakter peserta didik. Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran kewarganegaraan, dan muatan materinya memiliki nilai karakter yang kaya, yang selanjutnya akan membantu mengintegrasikan konsep pendidikan karakter.

Pengembangan karakter siswa tidak hanya dapat dikembangkan melalui muatan materi kewarganegaraan, tetapi juga secara tidak langsung melalui berbagai tahapan kegiatan pembelajaran. Selain itu, pengembangan karakter siswa juga dapat didukung dengan penggunaan metode, media dan sumber belajar.

SARAN

Pendidikan karakter perlu dipersiapkan dalam pembelajaran mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. Pada tahap perencanaan harus disiapkan materi, metode, media, sumber belajar, tahapan kegiatan pembelajaran dan evaluasi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan karakter. Komponen komponen pembelajaran secara tidak langsung dapat membantu

DAFTAR PUSTAKA

- Samsuri. (2011). "Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Kompetensi Warga Negara". Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Program Studi PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan, Senin, 9 Mei 2011 di Kampus II UAD, Yogyakarta
- Wahab, A. A dan Sapriya. (2011). Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Alfabeta.
- Akbal, M. (2017, October). Pendidikan Kewarganegaraan dalam pembangunan karakter bangsa. In Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-Ilmu Sosial (Vol. 2, pp. 485-493).
- Budimansyah, D. 2010. Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Karakter Bangsa. Bandung: Widya Aksara Press.
- Cholisin. 2011. Pengembangan Karakter Dalam Materi Pembelajaran Pkn. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Dianti, P. (2014). Integrasi Pendidikan Karakter dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk mengembangkan karakter siswa. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 23(1).
- Suwito, A. (2012). Integrasi Nilai Pendidikan Karakter ke dalam Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Melalui RPP. CIVIS, 2(2/Juli).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Depdiknas, Jakarta.
- Wiloati, D. (2014). "Pendidikan Kewarganegaraan". CV. Maulana Media Mardika, Bandung
- Sri Rahayu Ani, 2014. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Jakarta